

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Cet. I. Jakarta; Prestasi Pustaka.

-----, 2003. *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah*. Cet. I. Jakarta; Prestasi Pustaka.

-----, 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*. Cet. I. Jakarta; Prestasi Pustakarya.

Amiruddin dan H. Zainah Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta; Djambatan.

Burhan Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

D Romi Sihombing. 2022. *Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*. Jakarta; Kencana.

Hasan Basri Nata Manggala dan Sarjita. 2005. *Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah*. Yogyakarta; Tugu Jogja Pustaka.

Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Johny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayu Media Publishing.

Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Lubis, Yamin, dan Abd. Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Cet. II. Bandung; Mandar Maju.



2018. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

van dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya; Reality Publisher.

Marihot Pahala Siahaan. 2003. *Bea Perolehan Hak-hak atas Tanah dan Bangunan*. Cet. I. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.

Rusmandi Murad. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung; Alumi.

Rusli Effendy. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang; Hasanuddin University Press.

SF. Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Cet. III. Yogyakarta; FH UII Press.

Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI PRESS.

Supriadi. 2016. *Hukum Agraria*. Jakarta; Sinar Grafika.

Urip Santoso. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Cet. II. Jakarta; Kencana.

-----, 2006. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Cet. II. Jakarta; Prenada Media.

Skripsi dan Tesis

Friska Dwi Fafilia. 2019. *Analisis Yuridis Pembatalan Hak atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Nur Padly. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Milik atas Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Njoo Novi Natalia. 2007. *Penyelesaian Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah yang Cacat Hukum Administratif di Kantor Pertanahan Kota Semarang*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Jurnal:

Alfons, Dian Aries Mujiburohman, dan Sutaryono. 2021. *Penerbitan dan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Karena Cacat Administrasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10 Nomor 2 Agustus. Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau.



tario, Erlina. 2022. *Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia*. Notary Law Journal. Vol. 1 Issue 1 January. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

- Emia Alemnia, Rica Gusmarani. 2021. *Akibat Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik dalam Hal Terjadinya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Nomor 176K/TUN/2019*. Jurnal Notarius. Vol. 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nurul Fitria, Muh. Arfah Pattereng, dan Zulkifli Makkawaru. 2021. *Analisis Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Karena Menjalankan Putusan Pengadilan*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara. Vol. 3 Nomor 2 Juni. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Makassar.
- Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani. 2021. *Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Akibat Cacat Administrasi*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar.
- Untung Leksono. 2019. *Pembatalan Hak Milik atas Tanah*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol. 16 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semarang.
- Putu Rama Ari Pratama, I Gede Surata, dan I Nyoman Surata. 2023. *Proses Pembatalan Hak atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak atas Tanah di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Kertha Widya. Vol. 11 Nomor 1 Agustus. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Bali.
- Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Ratna Kumala Sari, dan Toni Mahasan. 2023. *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak atas Tanah Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Hak Milik Tanah*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 02 Nomor 02 Juli. Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Lampung.
- Rendra Adi Wibowo, Bambang Eko Turisno. 2024. *Analisis Proses Pembatalan Hak atas Tanah Akibat Ketidaksesuaian Administrasi dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora. Vol. 8 Nomor 1 April. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang

Petaturan Perundang-Undangan:

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.



Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Kota Makassar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 1584/UN4.5.1/PT.00/2024

Makassar, 06 Mei 2024

Lampiran : -

Hal : PENELITIAN

Kepada

Yth. : KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA MAKASSAR
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NABILA MUNTAZAH
No. Pokok : B011201086
No. HP : 0882020010458
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : perdos unhas tamalanrea jalan henry ford blok P No.11
Pembimbing : 1. Dr. Sri Susyanti Nur ,S.H., M.H.
2. Andi Suci Wahyuni ,S.H., M.Kn.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-05-06 12:09:08

Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar

 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA MAKASSAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222
Website <http://www.ptun-makassar.go.id> Email : makassar@ptun.go.id

Makassar, 14 Mei 2024

Nomor : 498 /KPTUN.W4-TUN1/KP4.1.1/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth
Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Kota Makassar,
Di -
MAKASSAR

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 1584/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 06 Mei
2024 Perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada
prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak keberatan untuk memberi
izin penelitian kepada :

Nama : NABILA MUNTAZAH
NO. POKOK : B011201086
Prog Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Poros Unhas Tamalanrea Jl. Henry Ford Blok P. No. 11

Dapat pula kami sampaikan bahwa yang mendampingi selama Penelitian
adalah **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar.

Dapat pula kami disampaikan bahwa apabila ada pengambilan data berupa
putusan agar bersurat secara resmi dan terdapat biaya yang harus dibayar secara
resmi. Untuk teknis pelaksanaannya agar menghubungi Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar dengan No. 081342426772.

Demikian di sampaikan dan terima kasih


WAKIL KETUA,
NUR AKTI



Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222
<http://www.ptun-makassar.go.id>, Email: ecourt.ptun.makassar@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor 429 /PAN.PTUN.W4/HK.01.0/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **NABILA MUNTAZAH**
NIM : **B011201086**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Alamat : **Perdos UNHAS Tamalanrea, Jalan Henry Ford Blok P**
No.11 Makassar
Judul Tesis : **" Analisis Hukum Pembatalan Hak Milik Atas Tanah**
Karena Cacat Administrasi".

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyelesaian Skripsi di Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, sebagaimana Surat Izin Penelitian tertanggal 06 Mei 2024,
Nomor: 1584/UN4.5.1/PT.00/2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Mei 2024
PLT. PANITERA MUDA HUKUM

MAK MUR LAWANG, SH.
NIP. 19641231 199103 1 068



Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 1584/UN4.5.1/PT.00/2024
Lampiran : -
Hal : **PENELITIAN**
Makassar, 06 Mei 2024

Kepada
Yth. : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**
di,
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NABILA MUNTAZAH
No. Pokok : B011201086
No. HP : 0882020010458
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : perdos unhas tamalanrea jalan henry ford blok P No.11
Pembimbing : 1. Dr. Sri Susyanti Nur ,S.H., M.H.
2. Andi Suci Wahyuni ,S.H., M.Kn.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated_byLawInformationSystem_Ruuh in 2024-05-06 12:18:02



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 15149/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 1584/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NABILA MUNTAZAH
Nomor Pokok	: B011201086
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Juni s/d 11 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Bertinggal.



Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (0411) 866622 email: kot-makassar@atrbpn.go.id

Nomor : UP.02.01/2433-73.71.100/VI/2024 Makassar, 13 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
di
Makassar

Menunjuk Surat Saudara Nomor 15149/S.01/PTSP/2024 Tanggal
11 Juni 2024 Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan kepada Saudara
bahwa Mahasiswa tersebut dapat melaksanakan Penelitian pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani secara
elektronik

Aslinda Amsak, S.E., M.M.
NIP. 19750512 200804 2 001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi 'Sentuh Tanahku'.

Makassar, Profesi, Terpercaya

4/1/25



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor
Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (0411) 866622 email: kot-makassar@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 2690/SKet-73.71.100.UP.02.01/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NABILA MUNTAZAH
Nomor Pokok : B011201086
Pekerjaan : MAHASISWA (S1)
Program Studi : SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.

Telah mengadakan penelitian pada Instansi kami dalam rangka penyusunan
Skripsi dengan judul penelitian **"ANALISIS HUKUM PEMBATALAN HAK MILIK ATAS
TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani Secara
Elektronik

Aslinda Amsak, S.E., M.M.
NIP. 197505122008042001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

1/1/2024